

---

**PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN PENERAPAN SISTEM  
INFORMASI SEBAGAI MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA OPERATOR  
BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA)**

Marfudin

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Tarumanagara  
marfudin.117221017@stu.untar.ac.id

Rezi Erdiansyah

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara  
rezie@fikom.untar.ac.id (*corresponding author*)

*Masuk: 10-06-2024, revisi: 27-06-2024, diterima untuk diterbitkan: 02-07-2024*

---

**Abstract:** This study aims to examine the impact of Administration and Employee Competence on the Quality of Financial Statements by using Information Systems as a moderator variable at the Ministry of Law and Human Rights. The research method used is quantitative with the use of questionnaires as an instrument to collect data related to the variables studied. Questionnaires were distributed via Google Form to 127 operators in charge of managing BMN with more than 1 year of work experience. A total of 119 respondents returned the questionnaire completely. Data analysis was carried out using the Structural Equation Model (SEM) method with Partial Least Square (SEM-PLS) through SmartPLS 4.0 software. The research findings show that Administration has a positive impact on the Quality of Financial Statements, while Employee Competence does not have a significant impact on the Quality of Financial Statements. In addition, moderation by Information Systems did not manage to change the relationship between Administration and Financial Statement Quality, while moderation by Information Systems weakened the relationship between Employee Competence and Financial Statement Quality.

**Keywords:** BMN Administration, Employee Competence, Information System, Quality of Financial Statements

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak penatausahaan dan kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan dengan menggunakan sistem informasi sebagai variabel moderator di Kemenkumham. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan penggunaan kuisisioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data terkait variabel yang diteliti. Kuisisioner disebar melalui *Google Form* kepada 127 operator yang bertugas mengelola Barang Milik Negara (BMN) dengan pengalaman kerja lebih dari 1 tahun. Sebanyak 119 responden mengembalikan kuisisioner dengan lengkap. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Model* (SEM) dengan *Partial Least Square* (SEM-PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 4.0. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Penatausahaan memiliki dampak positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sementara Kompetensi Pegawai tidak memiliki dampak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Selain itu, moderasi oleh Sistem Informasi tidak berhasil mengubah hubungan antara Penatausahaan dan Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan moderasi oleh Sistem Informasi melemahkan hubungan antara Kompetensi Pegawai dan Kualitas Laporan Keuangan.

**Kata Kunci:** Penatausahaan BMN, Kompetensi Pegawai, Sistem Informasi, Kualitas Laporan Keuangan

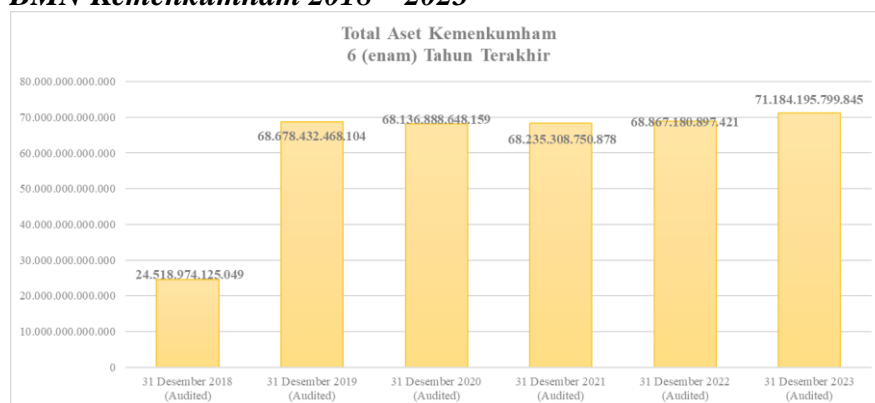
## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dalam hal ini Kementerian/Lembaga berupa pelayanan kepada masyarakat, dibutuhkan aset yang digunakan dalam melancarkan pekerjaan. Dalam sektor pemerintahan, aset ini disebut sebagai Barang Milik Negara (BMN), yang meliputi semua barang yang didapat dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau diperoleh secara sah melalui sumber lain (“PMK Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara,” 2016).

Pertanggungjawaban atas BMN menjadi sangat penting karena Kemenkumham wajib menyampaikan informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Laporan finansial ini disusun melalui mekanisme akuntansi yang meliputi laporan keuangan, aset, pendapatan, dan belanja. Informasi BMN merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan, yang diperoleh dari laporan persediaan, aset tetap, dan aset lainnya. Oleh karena itu, penatausahaan BMN menjadi peran yang penting dalam penyusunan laporan keuangan Kemenkumham. BMN yang dikelola dan dimiliki Kemenkumham selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel berikut

**Gambar 1**  
**BMN Kemenkumham 2018 – 2023**



Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022.

Kualitas laporan keuangan Kementerian diuji dan dinilai oleh BPK dalam rangka memberikan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diatur oleh Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Opini yang diberikan oleh BPK memperhitungkan sejauh mana LKPP sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penyajian LKPP Kementerian yang semakin berkualitas dibandingkan dengan periode sebelumnya ditandai dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) yang diberikan oleh BPK. Berikut adalah perkembangan opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dari Tahun 2018 - 2022:

**Tabel 1**  
**Tabel Perkembangan Opini Kementerian/Lembaga 2018-2022**

Opini	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	82	85	85	84	82
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	4	2	2	4	1
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1	1			
Tidak Wajar					
<b>Jumlah Entitas Pelaporan</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>83</b>

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022.

Menurut (Yusuf, 2013), penatausahaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup inventarisasi, pencatatan keuangan, dan pelaporan barang yang dimiliki oleh daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari penatausahaan barang daerah adalah untuk memastikan ketepatan data, mengidentifikasi nilai, status hukum, jumlah, dan kondisi barang yang dimiliki oleh daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Widyanti & Basuki, 2021), kompetensi karyawan terbagi menjadi dua jenis: *hard skills*, yang meliputi pengetahuan dan keterampilan, dan *soft skills*, yang mencakup tindakan, etos kerja, dorongan, gagasan, kreativitas, dan tenggang rasa. Tingkat motivasi seseorang akan semakin tinggi seiring dengan peningkatan kompetensinya.

Sejalan dengan perkembangannya, diperlukan sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi dan didukung oleh sistem SAKTI untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih baik (“PMK Nomor 17/PMK.01/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI,” 2021)(“PMK Nomor 17/PMK.01/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI,” 2021). Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta mendorong transparansi dan efisiensi dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan negara.

Sebelum aplikasi Sakti diterapkan di Kementerian/Lembaga, Sistem yang digunakan sebagai alat akuntabilitas dalam penyusunan neraca kemeterian/lembaga dan laporan BMN yaitu menggunakan SIMAK-BMN dan SIMAN. Berbeda dengan Sakti, Aplikasi Simak dan Siman tidak terintegrasi dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga pertanggungjawaban

Dikarenakan masih terdapat ketidakakuratan dalam proses penatausahaan berupa kegiatan pencatatan BMN yang bersumber kesalahan penggolongan dan kodefikasi barang, proses pembukuan yang belum semua satuan kerja tepat waktu, belum dijalankannya inventarisasi berupa opname fisik persediaan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali sehingga menyebabkan ketidak akuratan jumlah persediaan dengan jumlah real, belum dijalankannya proses sensus barang sekurang-kurangnya 5 tahun sekali, sehingga menyebabkan ketidakakuratan kondisi barang dan keberadaan barang, dokumen pelengkap dalam laporan berupa Catatan atas laporan BMN belum memadai sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena belum detail dituangkan dalam catatan yang menyebabkan ketidaksesuaian nilai BMN pada Laporan Keuangan.

### **Tujuan Penelitian**

- a. Menguji secara empiris peran Penatausahaan BMN Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- b. Menguji secara empiris peran Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- c. Menguji secara empiris peran Penerapan Sistem Informasi dalam memoderasi hubungan Penatausahaan BMN Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- d. Menguji secara empiris peran Penerapan Sistem Informasi dalam memoderasi hubungan Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Teori Stewardship (Stewardship Theory)**

Konsep ini diperkenalkan oleh (Davis et al., 1997), menekankan bahwa manajemen lebih berorientasi pada kepentingan organisasi daripada kepentingan individu. Teori ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi. Dasar dari teori ini adalah asumsi filosofis mengenai karakter manusia, seperti kepercayaan, tanggung jawab, integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Teori stewardship bisa diterapkan dalam konteks pengkajian akuntansi organisasi di sektor pemerintahan dan publik. Teori stewardship menyatakan bahwa keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ditentukan oleh perilaku dan sifat setiap individu dalam mencapai tujuan pemerintah, bahkan

jika harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, para pengelola (manajer dan auditor internal) menggunakan semua keterampilan dan pengetahuan mereka untuk mengoptimalkan pengendalian internal sehingga mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, yang memiliki ciri-ciri relevan, dapat diandalkan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang signifikan tentang kondisi keuangan dan semua aktivitas keuangan yang dilakukan oleh sebuah entitas pelaporan selama satu periode tertentu. Hasil tersebut terutama digunakan untuk menilai nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas operasional entitas pemerintahan, mengevaluasi situasi keuangan, mengukur efektivitas dan efisiensi dari sebuah entitas pelaporan, dan membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku (Hainil et al., 2021).

Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, laporan keuangan akan direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Jenderal guna memastikan kualitasnya sesuai dengan SAP. Berdasarkan amanat Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang tentang BPK Nomor 15 Tahun 2006, BPK akan memverifikasi laporan keuangan yang telah disusun. BPK melakukan audit ini untuk memberikan pendapat mengenai kepatutan laporan keuangan dengan mempertimbangkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### **Sistem Informasi**

(Romney & Steinbart, 2015) menjelaskan bahwa terdapat enam komponen utama dalam kegiatan sistem informasi, yaitu orang yang menggunakan sistem, metode dan arahan, data organisasi, peranti lunak, perangkat teknologi informasi, dan pengelolaan internal dan pengukuran keamanan. Komponen-komponen ini sangat penting bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dalam mengelola sumber daya, data, dan pengendalian internal.

Dalam Sistem informasi Sakti terdapat beberapa modul terkait perencanaan sampai Pembayaran. Diantara modul tersebut terdapat modul yang dioperasikan oleh operator BMN yaitu modul persediaan dan modul aset tetap ("PMK Nomor 17/PMK.01/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI," 2021). Dalam pendetailan aset, operator BMN menggunakan aplikasi SIMAN yang merupakan aplikasi untuk mendukung proses pengelolaan BMN yang diakses secara online oleh Pengelola/Kementerian Keuangan dan Pengguna, termasuk Kementerian Hukum dan HAM RI. Data SIMAN berasal dari SIMAK BMN dan disajikan dengan berbagai fitur untuk melengkapi atribut aset. Fitur-fitur ini mencakup pendetailan aset, riwayat aset, pemeliharaan, penilaian, pengguna, mutasi, lokasi GPS, serta dokumentasi berupa foto. Tujuan fitur tersebut adalah untuk memperkaya data SIMAK BMN dan memudahkan pengelolaan Barang Milik Negara.

### **Kompetensi Pegawai**

Menurut (Werther et al., 1996), SDM adalah karyawan yang memiliki kesiapan, kemampuan, dan kesiagaan dalam mencapai tujuan organisasi. Dimensi utama dari perspektif SDM adalah partisipasinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi utama dari perspektif manusia adalah perlakuan terhadap kontribusinya. Perlakuan yang baik akan mempengaruhi kualitas dan kapabilitas hidup SDM, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka terhadap organisasi.

Menurut (Erdiansyah et al., 2023) Kompetensi merupakan kemampuan karyawan atau seseorang untuk meningkatkan kepuasan dalam organisasi, termasuk diantaranya kemampuan seseorang mentransfer keterampilan dan pengetahuan dalam situasi yang baru sehingga mampu mencapai kinerja yang baik untuk kepentingan organisasi, untuk menemukan seseorang atau

SDM yang berkompotensi dapat dilakukan melalui seleksi, perencanaan, evaluasi maupun pelatihan dan pengembangan SDM.

Kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil (ASN) di pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Standar Kompetensi Jabatan ASN nomor 38 Tahun 2017. Peraturan ini menetapkan bahwa ASN harus memiliki kompetensi tertentu sebagai berikut:

1. Kompetensi Manajerial, kemampuan mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, membangun hubungan, merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan pekerjaan.
2. Kompetensi Teknis, memiliki keterampilan yang dibutuhkan, kemampuan menganalisis dalam memecahkan masalah teknis, kemampuan menggunakan teknologi informasi, selalu berinovasi dan mengembangkan solusi baru.
3. Kompetensi Sosila Kultural, kemampuan memahami dan menghargai perbedaan budaya, dapat bekerja sama dengan orang lain dari berbagai latar belakang yang berbeda.

### **Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari penatausahaan BMN adalah memastikan keabsahan data yang didapat serta memahami nilai, status hukum, dan kondisi barang milik daerah yang dikuasai (Yusuf, 2013).

Ruang lingkup Penatausahaan BMN Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 meliputi:

1. Pembukuan, yang terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pendataan BMN ke dalam Daftar Barang;
2. Inventarisasi, yang terdiri atas kegiatan penyusunan, penulisan, dan pelaporan hasil pendataan BMN; dan
3. Pelaporan, yang terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan.

### **Keterkaitan Antar Variabel**

#### **Kaitan antara pengaruh Penatausahaan terhadap Kualitas laporan Keuangan**

Menurut (Amiri, 2014) permasalahan klasik yang sering timbul di lapangan seperti manajemen sumber daya manusia terhadap ketidak pedulian dalam penatausahaan aset yang belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BPK sebagai auditor negara terhadap laporan keuangan satuan kerja. Penelitian (Fajri & Fuadi, 2021) menghasilkan Penatausahaan BMN berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan Penelitian oleh (Santosa, 2021) menyatakan Penatausahaan berpengaruh positif terhadap laporan keuangan.

H<sub>1</sub>: Penatausahaan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

#### **Kaitan antara pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas laporan Keuangan**

Kompetensi adalah suatu keahlian dan keterampilan yang didapat oleh seseorang yang diaplikasikan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Menurut (Wibowo, 2014) mendefinisikan kompetensi sebagai kecakapan melaksanakan tugas ataupun pekerjaan dengan dilandasi oleh pemahaman, keahlian serta didukung oleh perilaku yang jadi keunikan individu.

Teori stewardship memberikan suatu gagasan bahwa keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dipengaruhi perilaku dan sifat setiap individu dalam mencapai sasaran tujuan pemerintah dalam segala aspek meskipun dengan mengesampingkan kepentingan pribadi. Implikasi teori steward terhadap penelitian ini adalah mampu menjelaskan peran pemerintah sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam menampung aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang baik kepada publik, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya. Dengan

demikian, tujuan ekonomi dapat tercapai, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan dapat terwujud.

Menurut (Hardyansyah & Khalid, 2016; Lestari & Ardini, 2023; Mugiarty et al., 2018) menunjukkan bahwa kompetensi pegawai berdampak positif signifikan terhadap suatu kualitas laporan keuangan.

H<sub>2</sub>: Kompetensi pegawai berpengaruh pada kualitas laporan keuangan

### **Kaitan antara pengaruh Penerapan Sistem Informasi dalam memoderasi Penatausahaan terhadap Kualitas laporan Keuangan**

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola data keuangan dan akuntansi. SIA menciptakan informasi yang berguna bagi pengelola dalam mengambil keputusan yang tepat dan akurat (Mulyadi, 2016).

Menurut (Athiqotul et al., 2019; Firmansyah & Hollyson, 2021) menunjukkan bahwa penatausahaan BMN yang dimoderasi Sistem Informasi Manajemen Aset berdampak positif relevan terhadap laporan keuangan.

H<sub>3</sub>: Penatausahaan BMN yang dimoderasi Sistem informasi berpengaruh pada kualitas laporan keuangan

### **Kaitan antara pengaruh Penerapan Sistem Informasi dalam memoderasi Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dengan tujuan utama untuk menyediakan informasi yang akurat dan jujur bagi para pengambil keputusan, baik internal maupun eksternal dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan kompeten. Latar belakang pendidikan yang sesuai, contohnya penyusunan laporan keuangan haruslah dari pendidikan akuntansi, kerap mendapatkan pelatihan, dan memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi. Sehingga, pegawai tersebut dapat berpikir secara akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Pengkajian yang dilakukan oleh (Hardyansyah & Khalid, 2016; Mugiarty et al., 2018) menghasilkan sistem informasi serta kompetensi pegawai berdampak positif relevan terhadap laporan keuangan

H<sub>4</sub>: Kompetensi pegawai yang dimoderasi Sistem informasi berpengaruh pada kualitas laporan keuangan

### **Penelitian Terdahulu Penatausahaan**

Penelitian terkait pengaruh penatausahaan BMN terhadap kualitas Laporan Keuangan sebelumnya diuji menggunakan variabel yang berbeda yaitu SIMAK-BMN yang menunjukan Penatausahaan BMN dan Penerapan SIMAK BMN secara serempak berdampak positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Fajri & Fuadi, 2021) sedangkan hasil dari yang lain didapatkan hasil bahwa kegiatan penatausahaan, dan implementasi SIMAK BMN secara serempak berdampak atas kualitas laporan keuangan. Secara sebagian didapatkan proses pembukuan berdampak positif signifikan atas kualitas laporan keuangan, tetapi inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, serta pelaporan tidak berdampak signifikan tetapi berdampak secara positif atas kualitas laporan keuangan, dan juga SIMAK BMN tidak berpengaruh atas kualitas laporan keuangan (Novira Andiani et al., 2017).

### **Kompetensi Pegawai**

Menurut (Hardyansyah & Khalid, 2016; Lestari & Ardini, 2023; Mugiarty et al., 2018) menunjukkan hasil kompetensi pegawai berdampak positif signifikan atas kualitas laporan keuangan berbeda dengan penelitian (Firmansyah & Hollyson, 2021; Isnaen & Albastiah, 2021) menunjukkan bahwa kompetensi pegawai tidak berpengaruh relevan atas laporan keuangan.

## Sistem Informasi

Menurut (Amaliah et al., 2019; Fajri & Fuadi, 2021; Firmansyah & Hollyson, 2021) mengungkapkan penerapan Sistem Informasi menghasilkan positif yang signifikan atas kualitas laporan keuangan berbeda dengan penelitian oleh (Isnaen & Albastiah, 2021; Novira Andiani et al., 2017) yang mengungkapkan penerapan Sistem informasi tidak signifikan atas kualitas laporan keuangan.

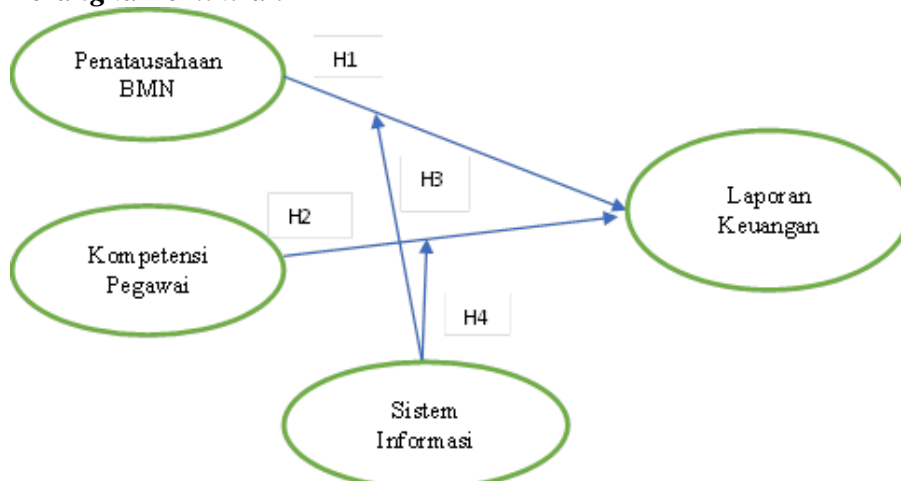
## Kualitas Laporan Keuangan

Menurut (Fajri & Fuadi, 2021) mengungkapkan bahwa penatausahaan BMN dan sistem informasi berupa Simak BMN menghasilkan positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan serta penatausahaan yang dimoderasi oleh Sistem informasi Simak juga menghasilkan positif signifikan berbeda dengan penelitian oleh (Amaliah et al., 2019) yang menghasilkan penerapan penatausahaan BMN tidak berdampak atau negative signifikan atas laporan keuangan tetapi sistem informasi berpengaruh positif signifikan dan penatausahaan BMN yang dimoderasi penerapan Sistem informasi juga berdampak positif atas laporan keuangan.

## Kerangka Pemikiran

Gambar 2

### Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti (2024)

Berdasarkan dari Gambar 2 yang sudah disajikan diatas, maka ringkasan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Penatausahaan BMN berdampak atas Kualitas Laporan Keuangan
- H<sub>2</sub>: Kompetensi Pegawai berpengaruh atas Kualitas Laporan Keuangan.
- H<sub>3</sub>: Penerapan Sistem Informasi dapat memperkuat pengaruh penatausahaan BMN atas Kualitas Laporan Keuangan.
- H<sub>4</sub>: Penerapan Sistem Informasi dapat memperkuat pengaruh kompetensi pegawai atas Kualitas Laporan Keuangan.

## METODOLOGI PENELITIAN

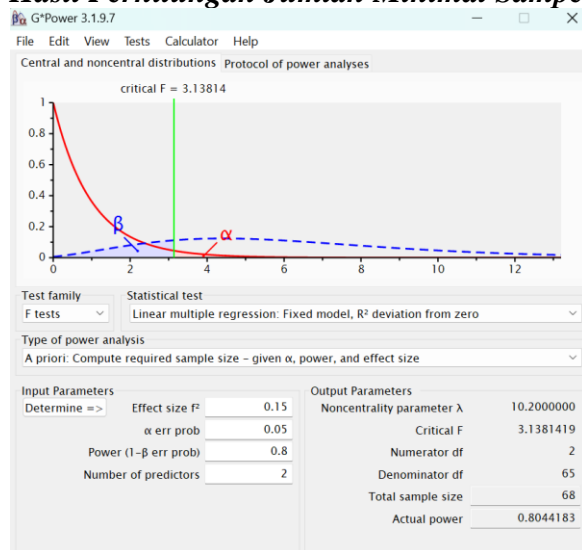
Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, yang menggunakan kuisioner sebagai teknik untuk mengumpulkan data terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu pengelola barang milik negara dengan memberikan angket online melalui sebuah aplikasi *Google Form* dengan tautan <https://bit.ly/KuisionerBMN>. Penelitian ini memakai SmartPLS 4.0 karena software tersebut dapat memberikan panduan yang relevan atas data primer.

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini mengaplikasikan purposive sampling, dikarenakan sampel dipilih secara sengaja untuk mempertimbangkan relevansi dan kemampuan dalam memberikan informasi yang diperlukan. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk memilih sampel yang sesuai dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode G Power untuk menentukan jumlah minimal sample. Dengan menggunakan G\*Power 3.1.9.7, peneliti dapat menghitung power analysis untuk mengukur jumlah minimal sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini (Kang, 2021). Dengan *effect size*  $f^2$  pada angka 0.15,  $\alpha$  err prob pada 0.05, power 0.80, dan *number of predictors* 2, peneliti menemukan angka 68 untuk menjadi nilai minimal sampel dengan *actual power* 0.8044183

**Gambar 3**  
**Hasil Perhitungan Jumlah Minimal Sampel dengan G\*Power**



Sumber: Peneliti (2024)

Sampel pada penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria: Aparatur Sipil Negara pada Unit Pusat dan Satuan Kerja Kantor Wilayah Kemenkumham dengan jabatan pengelola BMN minimal 1 (satu) tahun. Berdasarkan kriteria dimaksud diperoleh jumlah sampel sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) ASN dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Sebaran Sampel di Satuan Kerja Kemenkumham**

Unit Pusat dan Kantor Wilayah	Jumlah
Sekretariat Jenderal	26
Inspektorat Jenderal	2
Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	2
Ditjen Administrasi Hukum Umum	4
Ditjen Pemasyarakatan	7
Ditjen Imigrasi	4
Ditjen Kekayaan Intelektual	4
Ditjen Hak Asasi Manusia	1
Badan Pembinaan Hukum Nasional	1
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3
Badan Strategi Kebijakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	1
Aceh	2
Sumatera Utara	4
Sumatera Barat	4
Riau	1
Kepulauan Riau	3



Sumatera Selatan	2
Jambi	1
Lampung	1
Bengkulu	2
Bangka Belitung	2
DKI Jakarta	4
Banten	1
Jawa Barat	5
Jawa Tengah	5
Daerah Istimewa Yogyakarta	1
Jawa Timur	5
Kalimantan Barat	1
Kalimantan Selatan	2
Kalimantan Tengah	1
Kalimantan Timur	1
Sulawesi Utara	2
Sulawesi Tengah	2
Sulawesi Selatan	4
Sulawesi Barat	2
Sulawesi Tenggara	1
Gorontalo	1
Bali	1
Nusa Tenggara Barat	2
Nusa Tenggara Timur	2
Maluku	1
Maluku Utara	2
Papua	2
Papua Barat	2
<b>Jumlah</b>	<b>127</b>

Sumber: Peneliti (2024)

### Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif, yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang terhimpun sebagaimana adanya tanpa membuat konklusi yang berlaku umum atau menyamaratakan (Sugiyono, 2018). Selain itu, analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)*, yang adalah model persamaan *Structural Equation Modeling (SEM)* yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel penelitian. Software yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah Smart PLS 4.0.

Menurut (Harahap, 2016), SmartPLS adalah software statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel, serupa dengan Lisrel dan AMOS. Software ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, SmartPLS lebih powerful karena tidak mendasarkan pada banyak asumsi. Kedua, lebih hemat sampel karena jumlah sampel yang dibutuhkan relatif kecil. Ketiga, cocok untuk model kompleks dan ideal digunakan ketika sampel terbatas serta modelnya kompleks. Keempat, SmartPLS bebas distribusi normal sehingga tidak mensyaratkan data yang normal. Kelima, software ini sangat fleksibel karena mampu menguji model SEM formatif dan reflektif dengan skala pengukuran indikator yang berbeda.

Hasil penelitian dikatakan valid jika data yang terkumpul memiliki kesamaan dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk menguji apa yang seharusnya dinilai (Sugiyono, 2018). Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, akan dilakukan pengujian yang terbagi menjadi *Convergent Validity*, *Average Variance Extrated (AVE)* dan *Discriminant Validity*. (Latan & Ghazali, 2012) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk menguji suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubahan atau konstruk.

**HASIL DAN KESIMPULAN****Hasil****Tabel 3****Demografi Responden**

Deskripsi	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Pria	74	62,18%
	Wanita	45	37,82%
<b>Total</b>		<b>119</b>	<b>100,00%</b>
Usia	21-25	3	2,52%
	26-30	23	19,33%
	31-40	66	55,46%
	41-50	23	19,33%
	>50	4	3,36%
<b>Total</b>		<b>119</b>	<b>100,00%</b>
Status Pendidikan Terakhir	SMU sederajat	16	13,45%
	D1/D2/D3 sederajat	7	5,88%
	S1	67	56,30%
	S2	29	24,37%
<b>Total</b>		<b>119</b>	<b>100,00%</b>
Lama Bekerja	1-2 tahun	14	11,76%
	3-5 tahun	20	16,81%
	>5 tahun	85	71,43%
<b>Total</b>		<b>119</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Peneliti (2024)

Dari Tabel 3 ditemukan hasil yang mendominasi responden berjenis kelamin Pria sebanyak (62,18%), usia 31-40 tahun (55,46%), latar belakang pendidikan terakhir S1 (56,30%), serta lama bekerja diatas 5 tahun (71,43%).

Dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert yang memiliki 6 angka penilaian untuk mengukur sikap setuju atau tidak setuju terhadap suatu keadaan atau kejadian tertentu. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif menyajikan nilai minimum, maksimum, mean, median dan standar deviasi.

**Tabel 4****Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Med	Std. Dev
Penatausahaan BMN (X1)	119	4,5	6	5,585	5,750	0,439
Kompetensi Pegawai (X2)	119	4,5	6	5,520	5,600	0,445
Sistem Informasi (Z)	119	3,7	6	5,523	5,600	0,465
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	119	4,8	6	5,601	5,900	0,443

Sumber: Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif Tabel 4, nilai mean untuk Penatausahaan BMN, kompetensi pegawai, sistem informasi, dan kualitas laporan keuangan menghasilkan nilai di atas 3.5. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden setuju bahwa dalam proses penatausahaan mereka memiliki kompetensi yang baik, tersedianya sistem informasi yang baik, untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan.

Pengukuran validitas konvergen dapat menunjukkan apakah item pertanyaan mengukur kesamaan dimensi variabel tersebut. Berikut hasil ujiannya:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Validitas Indikator Kuisisioner**

Indikator	Hasil Outer Loading				AVE	Hasil
	Penatausahaan (X1)	Kompetensi Pegawai (X2)	Sistem Informasi (Z)	Kualitas Laporan Keuangan (Y)		
PEN2	0,762				0,696	Valid
PEN3	0,727					Valid
PEN6	0,730					Valid
PEN8	0,826					Valid
PEN9	0,847					Valid
PEN10	0,903					Valid
PEN11	0,929					Valid
PEN12	0,921					Valid
KP2		0,787			0,660	Valid
KP7		0,819				Valid
KP8		0,837				Valid
KP10		0,805				Valid
SI1			0,717		0,690	Valid
SI3			0,840			Valid
SI4			0,884			Valid
SI5			0,814			Valid
SI6			0,882			Valid
SI7			0,741			Valid
SI9			0,904			Valid
SI10			0,845			Valid
KLK1				0,875	0,774	Valid
KLK2				0,862		Valid
KLK3				0,946		Valid
KLK4				0,932		Valid
KLK5				0,898		Valid
KLK6				0,812		Valid
KLK7				0,851		Valid
KLK8				0,856		Valid

Sumber: Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 5 hasil menunjukkan bahwa sudah terpenuhinya persyaratan dalam pengukuran Convergent Validity yaitu nilai Loading Factor untuk setiap indikator harus memenuhi persyaratan dengan memiliki nilai > 0,700 serta nilai *Average Variance Extrated* (AVE) memiliki nilai > 0,500 (Latan & Ghozali, 2012).

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability	Hasil
Penatausahaan BMN (X1)	0,936	0,939	Reliabel
Kompetensi Pegawai (X2)	0,828	0,830	Reliabel
Sistem Informasi (Z)	0,935	0,940	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,958	0,960	Reliabel

Sumber: Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 6 hasil pengujian menunjukkan terpenuhinya syarat nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* dengan nilai di atas 0,700. Hasil ini dapat dikatakan bahwa reliabilitas dari indikator-indikator dalam penelitian ini reliabel.

Dalam penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10,00, guna mencegah kemungkinan adanya masalah kolinearitas antara konstruk-konstruk yang diteliti. Berikut hasil uji penelitian ini:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Kolinearitas Variabel**

Variabel	Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Penatausahaan BMN (X1)	9,111
Kompetensi Pegawai (X2)	3,109
Sistem Informasi (Z)	5,196
Penatausahaan BMN (X1)*Sistem Informasi (Z)	4,142
Kompetensi Pegawai (X2)*Sistem Informasi (Z)	1,704

Sumber: Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 7 seluruh nilai VIF tidak ada yang melebihi nilai 10,00 (Kock, N., & Lynn, 2012), hal ini menandakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam penelitian ini.

**Tabel 8**  
**Nilai *f-squared effect size***

Variabel	Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Penatausahaan BMN (X1)	0,295
Kompetensi Pegawai (X2)	0,023
Sistem Informasi (Z)	0,124
Penatausahaan BMN (X1)*Sistem Informasi (Z)	0,031
Kompetensi Pegawai (X2)*Sistem Informasi (Z)	0,048

Sumber: Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 8 hasil *f-squared effect size* ditemukan bahwa nilai Kompetensi Pegawai, Penatausahaan dimoderasi Sistem informasi dan kompetensi pegawai dimoderasi sistem informasi 0,023, 0,031 dan 0,048, mengindikasikan berada di kategori rendah. Hal ini bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh rendah atas Kualitas Laporan Keuangan. Sebaliknya Variabel Penatausahaan dan sistem informasi memiliki nilai 0,295 dan 0,124 yang berarti diterjemahkan bahwa variabel memiliki pengaruh sedang terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

$Q^2$  mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Apabila nilai  $Q^2$  lebih dari 0 maka menunjukkan tingkat relevansi prediktif yang lebih tinggi terhadap variabel endogen (construct) yang diteliti, sedangkan apabila nilai  $Q^2$  kurang dari 0 maka memperlihatkan model minim *predictive relevance* (Latan & Ghozali, 2012).

**Tabel 9**  
**Hasil  $Q^2$  Predictive Relevance**

Indikator	$Q^2$ predict
KLK1	0,670
KLK2	0,589
KLK3	0,783
KLK4	0,721
KLK5	0,654
KLK6	0,559
KLK7	0,584
KLK8	0,636

Sumber: Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 9  $Q^2$  Predictive Relevance pada penelitian ini menghasilkan bahwa setiap variabel dependen (endogen construct) memiliki relevansi prediktif lebih besar dari 0. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dependen memiliki relevansi prediktif yang signifikan.

Uji hipotesis dilakukan menggunakan metode bootstrapping dengan one-tailed. Hasil dari pengujian hipotesis penelitian dikatakan didukung jika nilai koefisien jalur positif sesuai dengan hipotesis penelitian, dan nilai signifikansi berupa *p-value* berada  $< 0.05$  dan *t-value*  $> 1.645$ . Sebaliknya, hipotesis dikatakan tidak didukung jika nilai koefisien jalur negatif tidak sesuai dengan hipotesis, atau nilai koefisien jalur sangat dekat dengan angka 0, dan nilai signifikansi berupa *p-value* berada  $> 0.05$  atau *t-value* di  $< 1.645$  (Hair et al., 2017).

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Hipotesis	Kode Hipotesis	Path coefficients	T statistics ( O/STDEV )	P values	Kesimpulan
Penatausahaan BMN -> Kualitas Laporan Keuangan	H1	0,618	4,870	0,000	didukung
Kompetensi Pegawai -> Kualitas Laporan Keuangan	H2	0,101	1,605	0,054	tidak didukung
Sistem Informasi -> Kualitas Laporan Keuangan		0,302	2,951	0,002	
Penatausahaan BMN * Sistem Informasi -> Kualitas Laporan Keuangan	H3	0,189	1,504	0,066	tidak didukung
Kompetensi Pegawai * Sistem Informasi -> Kualitas Laporan Keuangan	H4	-0,148	2,254	0,012	didukung

Sumber: Peneliti (2024)

### Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh penatausahaan dan kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan dengan penerapan sistem Informasi Sebagai Moderasi. Objek penelitian adalah operator BMN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penatausahaan BMN yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan secara signifikan berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan Kemenkumham. Penelitian ini sejalan dengan (Fajri & Fuadi, 2021), yang menemukan pengaruh positif signifikan penatausahaan BMN terhadap laporan keuangan, namun berbeda dengan (Amaliah et al., 2019) di Kemenag Gorontalo. Namun, kompetensi pegawai, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, selaras dengan hasil interaksi antara kompetensi pegawai dan sistem informasi berdampak negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan kurang meratanya peningkatan kompetensi melalui pendidikan akuntansi, pelatihan berkelanjutan dalam penggunaan sistem informasi SAKTI yang baru diimplementasikan di Kemenkumham dan pengalaman operator BMN di bidang keuangan serta latar belakang pendidikan yang kurang sesuai membuat operator BMN kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sedangkan hasil Interaksi antara penatausahaan BMN dan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, karena saat ini sistem informasi yang ada belum sepenuhnya mendukung seluruh proses penatausahaan.

Keterbatasan dari penelitian ini yakni hanya menggunakan data yang melibatkan responden di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga sampel yang diperoleh cukup kecil. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat menggunakan data dan responden dari beberapa Kementerian/Lembaga. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel penelitian yang berbeda untuk mengetahui kualitas laporan keuangan, seperti motivasi kerja, lingkungan kerja, komitmen organisasi dan kebijakan atau regulasi.

### DAFTAR PUSTAKA

Amaliah, T. H., Husain, S. P., & Selviyanti, N. (2019). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 120.

- Amiri, K. (2014). Pengelolaan BMN Secara Akuntabel Menuju Good Governance. *Potret Pemikiran*, Vol.20(No. 2), 31–44.
- Athiqotul, N., Rizal, A., & Hermanto, S. B. (2019). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Business Ethics and Strategy, Volumes I and II*, 22(1), 473–500.
- Erdiansyah, R., Ningsih, L. K., Setyawasih, R., Rustandi, Sitopul, P., Riana Dewi, S., Hehamahua, A., Ritonga, S., Prastiwi, N. L. P. E. Y. P., Hadiningrat, K. J., Kadiman, S., Syarweny, N., Supriyadinata, E., Adnyana, I. putu A., Tiong, P., & Hutapea, B. (2023). *HUMAN CAPITAL MANAGEMENT* (Cetakan Pe). CV. Pradina Pustaka Grup.
- Fajri, A. M., & Fuadi, R. (2021). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak Bmn) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Kantor Kementerian Negara/Lembaga Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.
- Firmansyah, A., & Hollyson, R. (2021). Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Bagaimana Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 6(2), 177–193.
- Hainil, S., Bakkareng, ;, Dica, ;, & Silvera, Lady. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Polresta Padang The Influence Of The Quality Of Human Resources In Accounting And Internal Control Systems On The Quality Of Fina. *Pareso Jurnal*, 3(3), 599–616.
- Hair, J. F., Hult, G. T., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) - Joseph F. Hair, Jr., G. Tomas M. Hult, Christian Ringle, Marko Sarstedt. In *Sage*.
- Harahap, L. K. (2016). *Analisis SEM ( Structural Equation Modelling ) Dengan SMARTPLS ( Partial Least Square ) Oleh : 1.*
- Hardyansyah, & Khalid, A. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 1(1), 1–24.
- Isnaen, F., & Albastiah, F. A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 51–63.
- Kang, H. (2021). *Sample size determination and power analysis using the G \* Power software*. 1–12.
- Kock, N., & Lynn, G. S. (2012). Lateral Collinearity and Misleading Results in Variance-Based SEM: An Illustration and Recommendations. *Journal of the Association for Information Systems*, 13(7), 546–580. <https://doi.org/10.1002/ctpp.19740140604>
- Latan, H., & Ghozali, I. (2012). *Partial least squares : konsep, teknik dan aplikasi SmartPLS 2.0 M3 untuk penelitian empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lestari, I. N., & Ardini, L. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(9), 65–75.
- Mugiarty, L., Ritchi, H., & Pratama, A. (2018). Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Negara (Survey pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(2), 261–274.
- Mulyadi, S. (2016). *Sistem Akuntansi* (Edisi 4). Salemba Empat.

- Novira Andiani, Dini Wahyu Hapsari, & Muhamad Muslih. (2017). Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta). *E-Proceeding of Management*, 4, 2796–2803.
- PMK Nomor 17/PMK.01/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. (2021). *Jdih.Kemenkeu.Go.Id*, 3, 1.
- PMK Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. (2016). *Menteri Keuangan*, 1–794.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Sistem informasi akuntansi*. Salemba Empat.
- Santosa, A. (2021). Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak Bmn) Terhadap. *Buletin Ekonomi*, 19(1), 1–14.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Werther, Davis, W. B., & Keith. (1996). *Human Resource and Personal Management* (5th ed.). McGraw – Hill.
- Wibowo. (2014). *Manajemen Kinerja* (Edisi Keem). Rajawali Pers.
- Widyanti, R., & Basuki, M. S. (2021). *Perilaku Organisasi (Teori dan Konsep) Jilid 1*.
- Yusuf, M. (2013). *Pengelolaan barang milik daerah: Teori dan praktik*. Alfabeta.